



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2012**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**2012**



## Kata Pengantar



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2012 dapat diselesaikan



Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri berkewajiban

menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu komponen kementerian Dalam Negeri, berkewajiban pula menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung akuntabilitas Kementerian Dalam Negeri di bidang Penelitian dan Pengembangan.

LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2012 yang tertuang dalam rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2010-2014. Pengukuran pencapaian output sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2012. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2012. LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran.

Semoga LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan di masa akan datang.

Jakarta, Januari 2012

**KEPALA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**AHMAD ZUBAIDI**



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Gambaran Organisasi .....	2
D. Aspek Strategis Organisasi .....	6
E. Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	9
A. Perencanaan Strategis 2010-2014 .....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2011 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011 .....	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Periode 2010- 2014 .....	19
C. Kegiatan BPP Yang Ditindaklanjuti .....	21
D. Akuntabilitas Keuangan .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	25
A. Kesimpulan .....	25
B. Saran-saran .....	25
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang – undang Dasar Republik 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2012 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program – program jangka panjang Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu kepada visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan 2010 -2014, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAKIP adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian capaian kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan bersama sama dengan IKU Komponen lainnya lingkup Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi mandat.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012 sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri umumnya.



3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012.

Tujuan penyusunan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum.
3. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

### C. GAMBARAN ORGANISASI

#### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tatakerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan

#### 3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 terdiri dari :

- 1) **Sekretariat Badan**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah, sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Bagian perencanaan, Bagian umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Kerjasama Litbang dan Administrasi Peneliti/Perekayasa. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan dan peraturan perundang – undangan, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan perpustakaan dan rekomendasi dan penyusunan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan administrasi peneliti dan perekayasa.
- 2) **Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan penelitian



dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah yang terdiri atas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Penataan Daerah, Bidang Pemerintahan Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah.

- 3) **Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Umum dan Kependudukan**, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan yang terdiri atas Bidang Trantib dan Linmas, Bidang Kewilayahan, Bidang Kependudukan dan Sub Bagian Tata Usaha; Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan.
- 4) **Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri atas Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa dan Sub Bagian Tata Usaha; Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 5) **Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembangunan dan Keuangan Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri atas Bidang Pembangunan Daerah, Bidang Keuangan Daerah, Bidang Ekonomi Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha; menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 dan optimalisasi peran penelitian dan pengembangan guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut BPP Kemendagri mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
2. Melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri;
3. Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
4. Membina Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
5. Memberikan fasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
6. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Eselon I di lingkungan Kemendagri.

Bila melihat Struktur Organisasi ini dan fungsi yang diemban oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan, keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri) juga mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan terhadap unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi dimaksud, dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis ke depan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menyusun Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan kelitbangan, khususnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2010-2014.

Berdasarkan pasal 39 Permendagri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sumber daya manusia kelitbangan terdiri dari

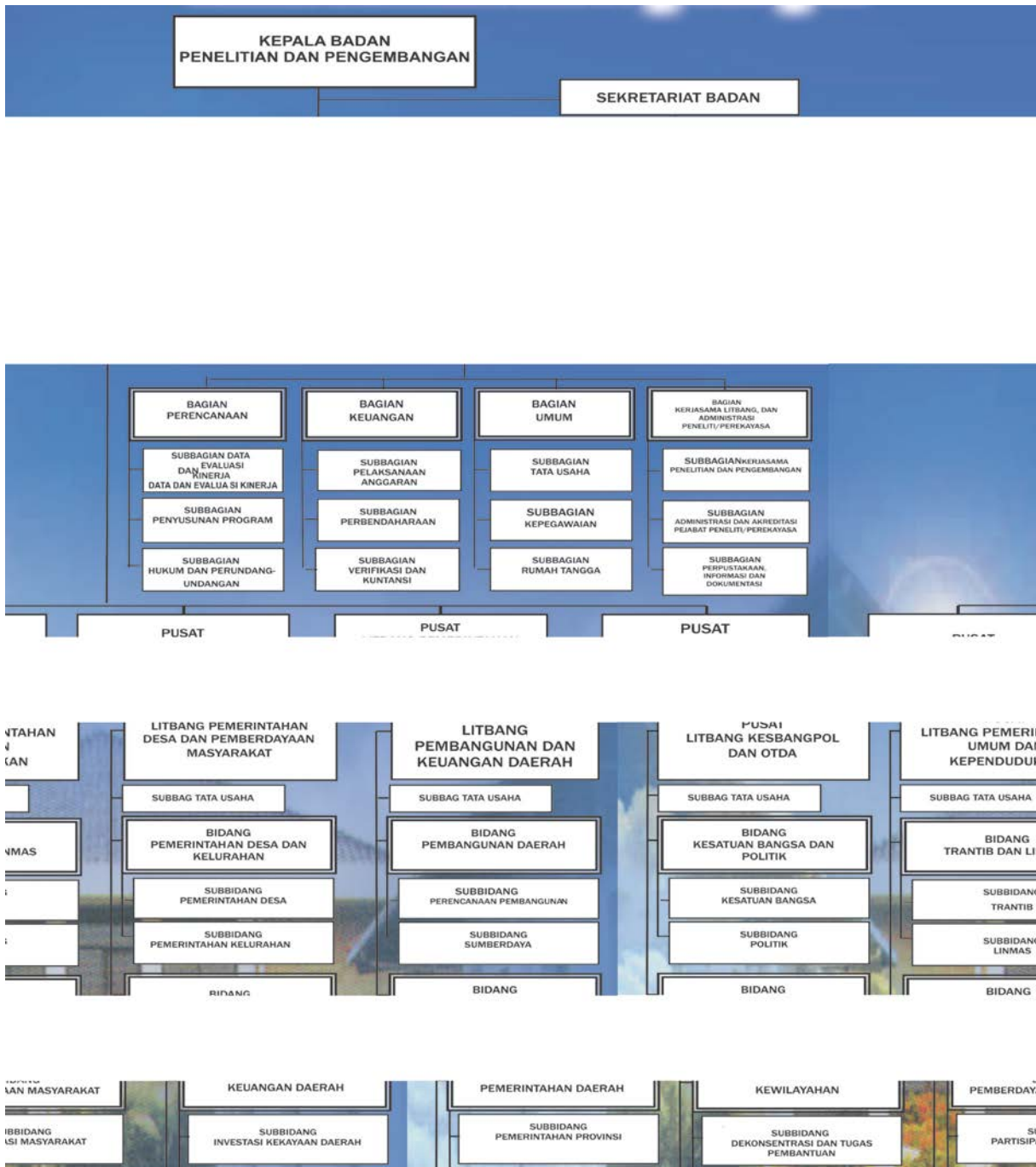
1. Peneliti, terdiri dari:
  - 1) Pejabat Fungsional Peneliti.
  - 2) PNS yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
2. Perekayasa.

Tenaga lainnya, yaitu :
3. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural.
  - 1) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus lainnya selain peneliti dan perekayasa.
  - 2) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum, dan Pegawai tidak tetap.





**Tabel 1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan**



Secara keseluruhan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sampai dengan tahun 2012 berjumlah 157 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. 22 orang pejabat fungsional peneliti,
2. 2 orang pejabat fungsional perekayasa,
3. 61 orang pejabat struktural yang terdiri dari pejabat Eselon I (1 orang), pejabat eselon II ( 5 orang), pejabat Eselon III ( 16 orang) dan pejabat Eselon IV ( 39 orang),
4. 72 staf pendukung,

Bagian terbesar pegawai ditempatkan pada Sekretariat, karena berfungsi sebagai unsur staf dalam rangka menyediakan pelayanan administrasi internal.





Sebagian staf lainnya ditempatkan pada masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan, sedang staf untuk menunjang kegiatan kelompok peneliti belum tersedia.

#### D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung Kementerian Dalam Negeri di bidang Penelitian dan Pengembangan dan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Menyimak perkembangan dinamika pemerintahan daerah dan otonomi daerah selama diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi tantangan pelajaran bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih berperan mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah. Menyadari kondisi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sudah sepatutnya memosisikan perannya dengan upaya-upaya penelitian/kajian yang strategis yang memiliki pemicu tinggi bagi perbaikan manajemen, melalui identifikasi isu-isu strategis/pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan institusi Kementerian Dalam Negeri yang cukup sentral dan stratejik untuk penciptaan iklim berpemerintahan daerah yang baik.

Secara prinsip, tugas pokok dan fungsi utama Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 dilaksanakan oleh 7 (tujuh) komponen pelaksana utama, yakni:

- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Bila melihat struktur organisasi ini, dapat dikatakan bahwa keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi setiap komponen, sehingga peran dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan saat ini dan di masa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan struktur organisasi masing-masing pusat litbang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi **mitra kerja** dari struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan yang ada di dalamnya yang merupakan **mitra kerja** bagi seluruh komponen pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercermin melalui nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pusat Litbang sebagaimana disebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah bermitra kerja dengan *Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Ditjen Pemerintahan Umum, serta Otonomi Daerah.*



2. Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan daerah bermitra kerja dengan *Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Pemerintahan Umum, serta Ditjen Otonomi Daerah.*
3. Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan bermitra kerja dengan *Ditjen Administrasi Kependudukan dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.*
4. Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat bermitra kerja dengan *Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

Dengan segala kendala dan keterbatasan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, pola dan alur kerja di atas diharapkan dapat terwujud dalam rangka **aktualisasi** dan **reorientasi** peran Badan Penelitian dan Pengembangan, khususnya dalam rangka mendukung pengambilan langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dari gambaran kondisi dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapat mewujudkan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga litbang yang profesional, handal dan terpercaya di bidang pemerintahan, keuangan daerah, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, serta kependudukan, Badan Penelitian dan Pengembangan harus mampu memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal. Oleh karena itu, strategi yang diharapkan oleh Badan Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan perannya secara profesional dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus menjadi lini terdepan dalam perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus mampu cepat dan tepat dalam memberikan berbagai informasi dan telaahan strategis bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan dalam situasi yang mendesak/darurat.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri membutuhkan SDM peneliti yang profesional dan *concern* di bidang penelitian dan pengembangan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Program dan kegiatan penelitian harus tajam dan fokus, sehingga benar-benar dapat bermanfaat dan menjadi kebutuhan *stakeholders* (pimpinan dan komponen Kementerian Dalam Negeri).

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat mengenai LAKIP, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi dan Sistematiaka Penyajian.

### **BAB II : Perencanaan Kinerja**

Berisikan tentang perencanaan strategis 2010 – 2014 dan rencana kinerja tahun 2011.



**BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

Berisikan tentang evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2011, evaluasi dan analisis capaian kinerja periode 2010 - 2014, dan akuntabilitas keuangan.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-saran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan datang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS 2010 - 2014.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (RPJM Nasional 2004-2009), sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 tahap kedua tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010-2014 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan dan dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2010-2014, Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2010-2014 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dalam periode lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan kementerian dalam negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

#### VISI

Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakkan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan lima tahun kedepan yaitu : **“Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengembangan”**.

#### MISI

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disebutkan diatas, maka *misi* yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbang;
3. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan Kementerian/LPND;
4. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
5. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah.

### **TUJUAN STRATEGIS**

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri
2. Meningkatkan pendayagunaan hasil – hasil penelitian dan pengembangan
3. Meningkatkan kemampuan profesionalitas SDM struktural, peneliti, perekayasa, fungsional khusus lainnya, dan fungsional umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Mewujudkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian Kemenetrian/LPNL, pemerintahan daerah, dan negara/lembaga donor asing.
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri.
7. Mendorong penguatan kelembagaan, pernaikan sustansi program dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan daerah.

### **SASARAN STRATEGIS**

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri, maka sasaran yang ditetapkan adalah :
  - 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pusat – pusat litbang di lingkungan BPP Kemendagri
  - 2) Meningkatnya keterlibatan dan keikutsertaan BPP dalam merumuskan kebijakan strategis lingkup Kemendagri.
2. Untuk mencapai tujuan meningkatkan pendayagunaan hasil – hasil penelitian dan pengembangan, maka sasaran yang ditetapkan adalah :



- 1) Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan bagi perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
- 2) Meningkatnya publikasi pemanfaatan hasil kelitbangan bagi perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
3. Untuk mencapai sasaran meningkatkan kemampuan profesionalitas SDM struktural, peneliti, perekayasa, fungsional khusus lainnya, dan fungsional umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka sasaran yang ditetapkan adalah :
  - 1) Meningkatnya kinerja pejabat struktural, pejabat fungsional peneliti, perekayasa dan fungsional lainnya.
  - 2) Tersedianya SDM struktural dan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa yang profesional dan berkualitas.
4. Untuk mencapai sasaran mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka sasaran yang ditetapkan adalah.
  - 1) Meningkatnya hasil - hasil kelitbangan, sebagai bahan kebijakan strategis lingkup Kepmendagri.
  - 2) Meningkatnya koordinasi kegiatan kelitbangan lingkup Kepmendagri.
5. Untuk mencapai sasaran mewujudkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian Kementerian/LPNL, pemerintahan daerah, dan negara/lembaga donor asing maka sasaran yang ditetapkan adalah.
  - 1) Meningkatnya sinergitas program dan kegiatan kelitbangan melalui koordinasi dan jejaring antara BPP Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.
  - 2) Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian/Kementerian/LPNL, pemerintah daerah, dan negara/lembaga donor asing.
6. Untuk mencapai sasaran mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri maka sasaran yang ditetapkan adalah :
  - 1) Meningkatnya peran lembaga litbang daerah sebagai think tank penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
  - 2) Meningkatnya kapasitas lembaga litbang daerah sebagai sumber data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
7. Untuk mencapai sasaran mendorong penguatan kelembagaan, pernaikan sustansi program dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan daerah maka sasaran yang ditetapkan adalah
  - 1) Meningkatnya kapasitas lembaga litbang daerah
  - 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan daerah.

## **STRATEGI KEBIJAKAN**

Mengacu pada visi, misi tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri 2010 - 2014, secara konsisten diarahkan pada upaya - upaya mendukung lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam





menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Upaya dan langkah strategik yang ditempuh adalah :

1. Menyelenggarakan kelitbangan berdasarkan kebutuhan regulasi dan/atau kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam perumusan kebijakankementerian dalam negeri.
2. Menyiappkan hasil kelitbangan sesuai dengan kaidah ilmiah dan kebutuhan, serta mengembangkan sarana publikasi.
3. Melaksanakan SOP dan mengikutsertakan SDM dalam diklat teknis, diklat fungsional, diklat terkait serta seminar/workshop/lokakarya nasional dan internasional.
4. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kelitbangan baik dengan komponen terkait di lingkungan kepmendagri, maupun dengan institusi litbang terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan.
5. Menyusun pedoman operasional dalam rangka mengembangkan jejaring dan kerjasama kelitbangan dengan kementerian/LPNK, pemerintah daerah, dan negara/lembaga donor asing.
6. Mendorong pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan peran lembaga litbang sebagai think tank dan basis data dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Melakukan pembinaan kelitbangan pemerintah daerah melalui fasilitasi, supervisi dan penyusunan NSPK.
8. Melakukan reposisi dan revitalisasi sumber daya kelitbangan.
9. Menyelenggarakan fungsi manajemen dan pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-382 Tahun 2011 tentang Review Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kepmendagri 2010 – 2014 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan rencana kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 disusun penetapan kinerja (PK) tahun 2012, yang kemudian diformulasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 berdasarkan pagu indikatif, pagu sementara dan berdasarkan pagu definitif. Rencana kinerja tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 merupakan instrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 061 – 41 tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 – 2014 merupakan penetapan indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan capaian kinerja jangka menengah renstra Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2010 - 2014. Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan program yang berkelanjutan, sehingga indikator



kinerja utama periode renstra tahun 2010-2014 merupakan lanjutan dari indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2005-2009.

Berdasarkan Renstra Kemendagri 2010 – 2014, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan 2010 -2014, dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 – 2014 ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan 2010 -2014 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2011**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	1. Laporan rekomendasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan 2. Laporan pelaksanaan kegiatan
		2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	1. Laporan rekomendasi hasil FGD/diskusi terfokus bidang Pemdagri 2. Laporan pelaksanaan kegiatan
		3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan 2. Laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 3. Laporan fasilitasi dan evaluasi kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2011 sebagaimana tabel 2 diatas, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 sebagai Kontrak Kinerja antara Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Menteri Dalam Negeri tahun 2012 sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011.



**Tabel 3**  
**Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2012**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100% 64 (laporan)
		2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	24 laporan
		3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100%

Jumlah anggaran : Rp. 56.347.471.000

Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012 tabel 5 berikut :

**Tabel 4**  
**Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2012**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100% 64 (laporan)
		2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	24 laporan
		3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100%



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Target pencapaian kinerja badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 merupakan tolok ukur keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2012 dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Penetapan kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan pada akhir tahun 2012, yaitu dengan membandingkan antara capaian kinerja dan aktual pada tahun 2012 dengan target kinerja yang dirumuskan dalam penetapan kinerja.

Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan hampir semua program dan kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 40.848.619.386,- atau 81,17% dari Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 50.322.705.000,-. Namun demikian, pencapaian sasaran kinerja atau output program atau kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan target kinerja semula, karena adanya permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan.

Capaian sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2012**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100% 64 (laporan)	30 laporan	46,87%
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	24 laporan	17 laporan	17 laporan
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100%	100 %	100%



Dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan satu sasaran strategis yang didalamnya ditetapkan indikator kinerja. Adapun uraian dari sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

**“Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan”**

Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.
2. Jumlah hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion/diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.
3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja.

**Tabel 7**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2012**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100% 16 laporan	37,5% 6 laporan	37,5% 6 laporan
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	6 laporan	3 laporan	3 laporan
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100% 4 laporan	100 % 4 laporan	100% 4 laporan

**Tabel 8**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Tahun 2012**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100% 16 laporan	37,5% 6 laporan	37,5% 6 laporan
	2. Jumlah hasil	6 laporan	3 laporan	3 laporan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
	penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti			
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100% 4 laporan	100 % 4 laporan	100% 4 laporan

**Tabel 9**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tahun 2012**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100% 16 laporan	37,5% 6 laporan	37,5% 6 laporan
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	6 laporan	5 laporan	5 laporan
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100% 4 laporan	100 % 4 laporan	100% 4 laporan





**Tabel 10**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100% 16 laporan	75% 12 laporan	75% 12 laporan
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	6 laporan	6 laporan	6 laporan
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100% 4 laporan	100 % 4 laporan	100% 4 laporan

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja pertama **“Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti** adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang **diseminarkan** Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan capaian 37,5 % tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%
2. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang **diseminarkan** Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda dengan capaian 37,5 % tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%
3. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang **diseminarkan** Pusat Litbang Pemerintahan umum dan kependudukan dengan capaian 37,5 % tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%
4. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang **diseminarkan** Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian 75 % tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%

Sasaran strategis dengan indikator kinerja kedua **“Jumlah hasil Focus Group Discussion (FGD) terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti”** adalah sebagai berikut :



1. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang **dipublikasikan** Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan jumlah capaian 3 laporan tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 6 laporan.
2. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang **dipublikasikan** Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda dengan jumlah capaian 3 laporan tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 6 laporan.
3. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang **dipublikasikan** Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan jumlah capaian 5 laporan tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 6 laporan.
4. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang **dipublikasikan** Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah capaian output 100 % dari target yang ditetapkan yaitu 6 laporan.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja ketiga “ **Persentase kesesuaian capaian kinerja kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja**” adalah sebagai berikut :

Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja, Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda, Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan serta, Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan capaian target yang ditetapkan.

Evaluasi capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, semua hasil penelitian, kajian dan pengembangan rata-rata diseminarkan serta Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu sarana untuk menjangring isu-isu aktual sebagai bahan masukan perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri atau komponen terkait, tahun anggaran 2012

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PERIODE 2010-2014

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan untuk tingkat Eselon II, berdasarkan Permendagri Nomor 41 tahun 2010 dari lima (5) eselon II menjadi empat (4) eselon II sehingga perbandingan capaian tujuan hanya tahun 2010-2012.

**Tabel 11**  
**Perbandingan capaian berdasarkan tujuan**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2010 s/d 2012**

TUJUAN	INDIKATOR	2010		2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	100 % 40 laporan	100 % 40 laporan	100 % 40 laporan	105 % 42 laporan	100 % 64 laporan	46,87 % 30 laporan



TUJUAN	INDIKATOR	2010		2011		2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	29 laporan	29 laporan	36 laporan	32 laporan	24 laporan	17 laporan
	3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja	100 % 1 laporan	100 % 1 laporan	100 % 4 laporan	100 % 4 laporan	100 % 4 laporan	100 % 4 laporan

Berdasarkan perbandingan capaian tujuan tahun 2010 s/d 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diseminarkan pada tahun 2010 mencapai target 100 % yaitu sebanyak 40 laporan, persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diseminarkan pada tahun 2011 melebihi dari target yang ditetapkan karena ada optimalisasi kajian mandiri yaitu mencapai 42 laporan dari 40 laporan yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2012 untuk prosentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan tidak mencapai target dari 64 target yang ditetapkan, yang terealisasi hanya 30 laporan hal tersebut disebabkan adanya pergantian pejabat kuasa pengguna anggaran dan pergantian pejabat komitmen kegiatan
2. Jumlah hasil penyelenggaraan GFD/diskusi terpokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan pada tahun 2010 mencapai target yang ditetapkan yaitu 29 laporan, hasil penyelenggaraan GFD/diskusi terpokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan pada tahun 2011 tidak mencapai target, dari 36 laporan yang menjadi target hanya terealisasi 32 laporan, hasil penyelenggaraan GFD/diskusi terpokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan pada tahun 2012 tidak mencapai target, dari 24 laporan yang menjadi target hanya terealisasi capaian target 17 laporan hal tersebut disebabkan selain yang dikemukakan diatas juga karena keterbatasan jumlah peneliti dan keterbatasan jumlah SDM.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa capaian realisasi target yang paling baik antara tahun 2010 s/d 2012 adalah capaian target tahun 2011 dari 40 target yang ditetapkan terealisasi 42 laporan.

3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja, tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mencapai target yang berisikan laporan monitoring, laporan penyusunan program, laporan lakip, dan laporan Renja KL setiap Pusat Litbang di Lingkungan Badan penelitian dan Pengembangan.



### C. KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TIDINDAKLANJUTI

Adapun kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh Komponen dan Staf Ahli Kemendagri Nomor 070/4616/SJ Tanggal 10 November 2010
2. Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah Nomor 070/38/SJ tanggal 5 Januari 2011.
3. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kesiapan Pemda Dalam menyongsong Pemungutan BPHBT telah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/343/Litbang tanggal 9 Maret 2011.
4. Pedoman Penyusunan Program Litbang di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah tahun 2012 tanggal 21 Maret 2011
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 - 360 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pokok - Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Program Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dan Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi tahun 2012 Nomor 050/1747/SL tanggal 11 Mei 2011
7. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Reformasi Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri yang Efektif dan Efisiensi telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/766/Litbang tanggal 9 Juni 2011
8. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Institusi Perbatasan Antar Negara : Studi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Wilayah Barat dengan Fokus Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Guna Mendukung Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/796/Litbang tanggal 17 Juni 2011.
9. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dan di kirim keseluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan Nomor Surat 511.1/5089/SJ tanggal 21 Desember 2011.
10. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Peran Litbang dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dan dikirim keseluruh gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan Nomor Surat 500/2717/SJ tanggal 13 Juli 2011.
11. Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
12. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2011 yang dilaksanakan di Provinsi Banten tanggal 17 s/d 20 Mei 2011 dan hasilnya telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/727/Litbang tanggal 31 Mei 2011.
13. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa telah dilaporkan kepada menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/1208/Litbang tanggal 7 September 2012.
14. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pemerintahan Desa Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa (Trantibmas) telah dilaporkan



- kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.40.1278/Litbang tanggal 21 September 2011.
15. Pedoman Penyusunan Program Kelitbang Tahun 2013 telah dikirim keseluruhan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor Surat 070/1082/SJ tanggal 28 Maret 2012
  16. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/742/Litbang tanggal 5 April 2012.
  17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
  18. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 073.04/740/Litbang tanggal 5 April 2012
  19. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Sosial di Era Reformasi telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/1048/Litbang tanggal 16 Mei 2012
  20. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/1047/Litbang tanggal 16 Mei 2012
  21. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2012 telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/1502/Litbang tanggal 16 Juli 2012
  22. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Mekanisme Pelaporan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas telah dilaporkan kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nota Dinas Nomor 080.04/1521/Litbang tanggal 17 Juli 2012.
  23. Pedoman Kajian Bersama Kelitbang di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Nomor 073/2299/Litbang tanggal 7 November 2012.
  24. Laporan Penelitian tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dilaporkan kepada menteri Dalam Negeri Nomor 070.04/2492/Litbang tanggal 4 Desember 2012.

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Tahun anggaran 2012 badan Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi pagu anggaran APBN (sesuai pagu indikatif) sebesar Rp. 56.347.471.000,- berdasarkan DIPA Nomor 2913/010-11.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, dengan adanya reward sebesar Rp. 200.000.000,- menambah anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Rp. 56.547.471.000,- berdasarkan revisi DIPA ke I dengan Nomor 2913/010-11.101/00/2012 tanggal 14 September 2012, dengan adanya pemotongan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 sebesar Rp. 6.224.766.000,- maka anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012 sebesar Rp. 50.322.705.000,-.

Pelaksanaan pagu anggaran tersebut terdistribusi dalam Program Penelitian dan Pengembangan, dengan lima ( 5 ) kegiatan :



1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 3.385.000.000,-
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.385.000.000,-
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.380.330.000,-
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 3.385.000.000,-
5. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.787.375.000,-

Lebih lanjut bila dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan terbagi dalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.753.124.000,- belanja barang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.521.501.000,- dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.521.501.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp. 40.848.619.386,- (*Empat puluh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*) atau 81,17 % dari anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 50.322.705.000,- (*Lima puluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah*), realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima) kegiatan utama, yaitu :

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan daerah, realisasi anggaran Rp. 3.212.935.408,- (*Tiga milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*) atau 94,92 % dari anggaran sebesar Rp. 3.385.000.000,- (*Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.352.963.350,- (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau 99,05 % dari anggaran sebesar Rp. 3.385.000.000 (*Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar 3.191.247.828,- (*Tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) atau 94,41% dari anggaran sebesar Rp. 3.380.330.000,- (*Tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.108.746.500,- (*Tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*) atau 91,84% dari anggaran sebesar Rp. 3.385.000.000,- (*Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- e. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam negeri, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 27.982.726.300,- (*Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah*) atau





76,07% dari anggaran sebesar Rp. 36.787.375.000,- (*tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran

1. Adanya pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (KPK) yang berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan
2. Legalisir pajak yang memakan waktu hampir 4 hari sehingga mempengaruhi perputaran uang (Revolving )
3. Pembangunan gedung yang terlambat di karenakan izi penghapusan aset dari DJKN belum selesai sampai dengan triwulan ke III tahun 2012



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk melihat kemampuan instansi tersebut dalam pemanfaatan sumberdaya yang dikelola dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah merupakan salah satu acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif. Sejauh ini perkembangan implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan menunjukkan peningkatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan capaian yang diperoleh dari kinerja unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan akan menjadi media umpan baik bagi peningkatan kinerja dan tindaklanjut program maupun kegiatan di tahun berikutnya. Selain itu pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan perlu dilihat efektifitasnya kontribusinya dalam pencapaian tujuan Kementerian sehingga dapat dijadikan daya dorong dalam perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih efektif pada masa mendatang

#### B. SARAN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh badan Penelitian dan pengembangan pada tahun 2012, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan perlu ditingkatkan lagi ditahun 2013.
2. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka meningkatkan kebersamaan dalam persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan program agar lebih fokus terintegrasi, dan komprehensif untuk pengendalian kinerja dan mendorong kontribusi capaian kinerja yang lebih baik terhadap seluruh kegiatan
3. Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan perangkat instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dalam mendukung tercapainya visi dan misi Badan penelitian dan Pengembangan.
4. Kinerja 2012 agar digunakan sebagai referensi dalam penyusunan indikator kinerja serta pencapaiannya di tahun mendatang.
5. Pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN